

# Pengelolaan Hutan Jati di *Afdeeling* Gunung Kidul, 1846-1933\*

Oleh: Ignasia Pola Septariska &  
Rini Andini Ambarwati Ekaputri\*\*

## Pendahuluan

Dalam sejarah Indonesia masa kolonial, masalah kehutanan sebenarnya juga menjadi salah satu bagian penting yang perlu diungkapkan di samping pertanian yang menjadi sumber perekonomian utama. Akan tetapi, bidang kehutanan tampaknya masih kurang mendapat perhatian dalam penulisan sejarah Indonesia.

Pada pertengahan abad XIX wilayah Indonesia masih memiliki lahan hutan yang sangat luas, baik hutan dengan tanaman sejenis maupun hutan dengan tanaman yang beragam. Salah satu hutan dengan tanamannya yang bermanfaat bagi manusia hingga saat ini adalah hutan yang ditumbuhi pohon-pohon jati (*tectona grandis*). Pertumbuhan hutan jati secara alami di Indonesia terbatas pada daerah beriklim muson di Pulau Jawa dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Mengenai asalnya ada dua pendapat yaitu pertama pohon jati adalah tanaman asli Indonesia, dan yang kedua menyebutkan bahwa pohon jati berasal dari India.<sup>1</sup> Di Pulau Jawa hutan jati banyak tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan di Jawa Barat hutan jati tidak terlalu luas.

Pohon jati (*tectona grandis*) termasuk jenis kayu yang paling berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi karena keawetannya, kestabilannya, bersifat menghiasi, dan mudah dikerjakan. Sifat-sifat kayu jati yang utama ini membuat orang lebih memilihnya untuk berbagai keperluan, antara lain untuk pembuatan kapal, bantalan kereta api, gagang senjata api, pembangunan keraton, masjid, bangunan-bangunan pekerjaan umum, dan keperluan sehari-hari. Kayu jati juga banyak dicari oleh orang Cina untuk pembuatan peti mati.<sup>2</sup>

---

\*Naskah asli dari tulisan ini merupakan skripsi S1 Ignasia Pola Septariska pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM, yang kemudian ditulis kembali dalam bentuk artikel oleh Rini Andini Ambarwati Ekaputri.

\*\*Keduanya alumni jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta.

<sup>1</sup>Hasanu Simon, *Hutan Jati dan Kemakmuran* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 27.; J.W.H. Cordes, *Hutan Jati di Jawa*, terj. (Malang: Yayasan Manggala Sylvia Lestari, Biro Jasa Konsultan Perencanaan Hutan, 1992), hlm. 152.; *Sejarah Kehutanan Indonesia I: Periode Pra-sejarah- tahun 1942* (Jakarta: Departemen Kehutanan, 1986), hlm. 17-22.

<sup>2</sup>Cordes, *op. cit.*, hlm. 19-23.; *Sejarah Kehutanan Indonesia I, op. cit.*, hlm. 35-39.

Sejak jaman Mataram sudah ada eksploitasi dan pengelolaan hutan jati yang dilakukan oleh orang *Kalang*.<sup>3</sup> *Kalang* adalah sebutan untuk sekelompok orang yang hidupnya mengelana khususnya di Jawa Tengah, mereka dianggap berbahaya karena sering merampas makanan penduduk. Pada masa Sultan Agung mereka ditangkap dan dimasukkan dalam satu tempat yang dipagari tinggi dan kuat yang kemudian disebut *Kalang* atau orang yang *dikalang*. Sultan mempekerjakan mereka sebagai pembuat alat-alat dari kayu, karena ketekunan mereka akhirnya mereka menjadi ahli bangunan dan pertukangan. Kompeni dan Pemerintah Hindia Belanda sering pula menggunakan mereka untuk membangun pemukiman Belanda dan kusir kereta angkutan perang dalam Angkatan Perang Kompeni. Daendels bahkan pernah memerintahkan kepada bupati di Jawa untuk membebaskan orang-orang *Kalang* dari pajak. Kegiatan eksploitasi dan pengelolaan tersebut dikenal dengan nama kerja *Blandongan*.<sup>4</sup> Kerja *blandongan* ini terutama diterapkan di desa-desa yang berada di sepanjang pesisir utara pulau Jawa mulai dari Cirebon sampai Banyuwangi. Kerja *blandongan* meliputi penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat penampungan di tepi-tepi sungai atau pantai, serta penanaman dan pemeliharaan hutan.

Eksplorasi hutan jati secara optimal bahkan cenderung besar-besaran mulai dilakukan sejak masa VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Bagi VOC hutan jati di Jawa merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting karena berguna sebagai bahan utama untuk pembuatan kapal dan perlengkapannya. Selama masa Kompeni hutan jati dibiarkan musnah, karena tidak ada imbalan antara penggunaan dan pelestariannya melalui pengelolaan yang baik.

Usaha memperbaiki pengelolaan hutan jati di Jawa baru dimulai oleh Gubernur Jendral William Daendels (1807-1811) ketika kerusakan hutan sudah tak dapat dihindari dan mencapai puncak yang mengkhawatirkan pada awal abad XIX. Pada tanggal 26 Mei 1808, Daendels mengeluarkan plakat pertama tentang kehutanan yang menyatakan akan segera dibentuk sebuah badan inspeksi yang membawahi administrasi hutan kayu di seluruh pulau Jawa.<sup>5</sup> Langkah pertama yang dilakukan Daendels untuk meletakkan dasar pembaharuan dalam menangani masalah kehutanan adalah mendirikan Direksi Kehutanan yang bertugas mengelola dan mengawasi hutan seluruh Jawa. Administrasi dan penguasaan hutan yang semula dipegang residen diambil alih Inspektur Jenderal (berkedudukan di Semarang) yang membawahi Administratur Kehutanan (satu

<sup>3</sup>Lihat Hamid Nuri, "Wong Kalang: Konglomerat Jaman Biyen", *Mekar Sari*, 4 Maret 1992.; Dik., "Wong Kalang Iku Sapa?", *Mekar Sari*, 26 Nopember 1990.

<sup>4</sup>Warto, "Kerja Blandongan: Eksploitasi Hutan di Karesidenan Rembang Abad XIX", *Majalah Sejarah*, no. 5, Juli 1994, hlm. 7, 17.

<sup>5</sup>Hasanu Simon, *op. cit.*, hlm. 31.; Sejarah Kehutanan Indonesia I, *op. cit.*, hlm. 56-57.

orang presiden dan empat orang anggota). Manajemen kehutanan yang diperkenalkan Daendels ini menjadi dasar bagi politik kehutanan pada masa selanjutnya di Hindia Belanda.<sup>6</sup>

Pada masa Raffles manajemen kehutanan ini disederhanakan dengan mengganti Direksi Kehutanan dengan *Superintendent* (pengawas umum) yang berkedudukan di Rembang.<sup>7</sup> Raffles hanya memusatkan perhatiannya pada hutan di kawasan Rembang, sementara hutan di kawasan lainnya diserahkan pada residen. Penyederhanaan ini dilakukan karena perhatian pemerintah Inggris terhadap masalah ini masih kurang. Selain itu pekerjaan ini memerlukan sejumlah pegawai yang harus digaji cukup besar, padahal pegawai-pegawai itu masih diragukan kesetiannya dan pemerintah sendiri belum dapat mengganti mereka dengan pegawai baru. Kebijakan ini walaupun hanya beberapa tahun saja akhirnya mengakibatkan musnahnya pekerjaan yang dirintis Daendels dan menciptakan periode baru yang membawa arus yang salah dan kerusakan hutan.

Proses pengelolaan hutan kembali mengalami hambatan ketika kebijakan Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) tahun 1830-1870 diberlakukan oleh Gubernur Jendral van Den Bosch. Ketentuan-ketentuan pengelolaan hutan tidak mungkin lagi dijalankan mengingat Tanam Paksa yang sangat memerlukan dengan segera bangunan-bangunan pabrik, bangsal, perumahan, kayu bakar, dan gudang-gudang.<sup>8</sup>

Pada tahun 1865 lahir Undang-Undang Kehutanan yang pertama untuk pulau Jawa dan Madura. Undang-Undang Kehutanan tahun 1865 ini dalam pelaksanaannya banyak kekurangan dan kelemahan, karena itu pada tahun 1874 diganti dengan Undang-undang Kehutanan yang baru yang juga berlaku di wilayah *Vorstelanden*, yang mencakup Yogyakarta dan Surakarta. Ketika VOC dibubarkan pemerintah Hindia Belanda mengumumkan bahwa hutan-hutan jati yang tidak termasuk dalam kepunyaan desa dan swasta menjadi kepunyaan Pemerintah Hindia Belanda, akan tetapi yang termasuk dalam wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Susuhunan Surakarta tetap menjadi milik Sultan dan Susuhunan yang diatur dalam Kontrak Politik dengan Pemerintah Kolonial.

Kontrak Politik berlaku di Kesultanan Yogyakarta sejak berdirinya Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 1755 akibat "*Palihan Negeri*" dan setiap kali pergantian tahta selalu diperbaharui. Dengan status pemerintahan semi-otonom ini kebijakan pengelolaan hutan di Gunung Kidul yang termasuk dalam wilayah Kesultanan Yogyakarta sangat berpengaruh. Pada masa itu di daerah Gunung Kidul terdapat kawasan hutan jati yang tersebar di beberapa

<sup>6</sup>Hasanu Simon, *op. cit.*, hlm. 30-31.; Sejarah Kehutanan Indonesia I, *op. cit.*, hlm. 58-63.; Wardo, *op. cit.*, hlm. 11.

<sup>7</sup>Cordes, *op. cit.*, hlm. 250.

<sup>8</sup>Sejarah Kehutanan Indonesia I, *op. cit.*, hlm. 67.; Hasanu Simon, *op. cit.*, hlm. 31.

daerah yaitu Playen, Karangmojo, Semanu, Potrobayan, Wonolegi, dan Nglipar. Akan tetapi setelah masa kemerdekaan daerah Gunung Kidul justru dikenal sebagai daerah gersang dan gundul.

Tulisan ini akan mengulas perjalanan pengelolaan hutan jati di Gunung Kidul yang dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta dan pihak Gubernemen, serta bagaimana pengaruh pengelolaan dan eksploitasi hutan jati tersebut bagi pengelola (Keraton Yogyakarta dan Gubernemen) serta ekologi kawasan Gunung Kidul dan penduduk sekitarnya.

### Ekologi Hutan Jati Gunung Kidul

*Afdeeling* Gunung Kidul termasuk dalam keresidenan Yogyakarta. Wilayah yang memiliki luas sekitar 1.485 km<sup>2</sup> ini berbatasan di barat laut dengan *regentschap* Kalasan, di barat daya dengan *regentschap* Bantul, di utara dengan *afdeeling* Klaten, di timur dengan Wonogiri, dan di selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia atau laut Selatan.

Wilayah *afdeeling* Gunung Kidul merupakan daerah pegunungan tersier yang membentang sepanjang selatan pulau Jawa. Pegunungan ini merupakan pegunungan kapur dengan ketinggian maksimal 1.260 m.<sup>9</sup> Daerah ini beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kering. Secara umum wilayah ini sebagian besar adalah lahan kering dengan letak permukaan tanah yang curam, terjal, dan berbatu, oleh karena itu tanah-tanah di daerah ini sulit untuk menyerap air. Dengan kondisi demikian sistem pertanian yang memungkinkan adalah dengan sistem *tegalan*, kecuali di daerah yang memiliki air yang cukup seperti di daerah sungai Oya dan dataran rendah Wonosari memungkinkan pertanian dengan lahan basah atau sawah. Dari utara ke selatan wilayah pegunungan ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu pegunungan utara atau wilayah Batur Agung, dataran rendah Wonosari atau wilayah Ledok Wonosari, dan pegunungan Sewu atau pegunungan Seribu.

Wilayah Batur Agung terletak di bagian paling utara (membujur dari barat ke timur) Gunung Kidul dengan ketinggian 200 - 700 m dari atas permukaan laut yang meliputi daerah Patuk, Nglipar, Ngawen, Semin, dan sebagian Ponjong bagian utara. Wilayah ini merupakan daerah berbukit-bukit dan berlereng. Di bagian selatan lereng lebih landai, sedangkan di bagian utara lereng sangat terjal. Dari permukaan yang miring terdapat sumber mata air dan air sumur yang dapat digali dengan kedalaman 6 - 12 m. Bagian utara pegunungan ini terdiri dari bahan vulkanis tua dan kapur (*marl*). Tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup dengan baik di sini adalah jati, akasia, sonokeling, mahoni, cengkeh, padi sawah dan padi gogo, serta palawija.

---

<sup>9</sup>*Encyclopaedia van Nederlandsch-Indie*, Jilid II ('s-Gravenhage-Leiden: M. Nijhoff-E.J. Brill, 1919), hlm. 314.

Wilayah Ledok Wonosari terletak di bagian tengah Gunung Kidul dengan ketinggian 150 – 200 m dari atas permukaan laut dan dikelilingi pegunungan sehingga seolah-olah berbentuk baskom sehingga wilayah ini disebut juga *Wonosari kom*. Wilayah ini meliputi Wonosari, Karangmojo, Semanu, Playen, dan Ponjong bagian tengah. Kondisi wilayah bagian tengah ini agak datar, sedikit bergelombang, dan sebagian besar tertutup endapan fluvial tebal yang berasal dari daerah sekitarnya. Dibandingkan dengan wilayah lainnya, Ledok Wonosari cukup memiliki persediaan air walaupun terjadi kemarau panjang karena adanya mata air dan sungai di wilayah ini. Tumbuh-tumbuhan yang dapat tumbuh dengan baik di daerah ini adalah padi sawah dan padi gogo, palawija, tembakau, kapuk randu, mlinjo, tebu, sayur-sayuran, dan tanaman keras seperti jati.

Bagian selatan yang disebut wilayah pegunungan Seribu meliputi Tepus, Panggang, Paliyan, Rongkop, Semanu bagian selatan, dan Ponjong bagian selatan. Wilayah ini memiliki ketinggian antara 100 – 300 m dari atas permukaan laut, permukaan tanahnya yang berbukit-bukit terdiri dari batuan kapur berbentuk kubah atau tempurung memanjang dari barat ke timur. Di wilayah ini tidak terdapat sungai di permukaan, tetapi banyak terdapat sungai bawah tanah yang berasal dari dataran rendah Wonosari.<sup>10</sup> Selain itu, ada pula sungai bawah tanah yang airnya tersembur keluar kemudian masuk lagi melalui gua atau *luweng* yang akhirnya bermuara di Samudera Indonesia. Air tanah baru dapat ditemui dengan kedalaman sekitar 100 m atau lebih dari permukaan tanah, sedangkan air di permukaan tanah hanya terdapat di sela-sela bukit yang berasal dari air hujan yang membentuk telaga. Telaga-telaga tersebut menjadi sumber mata air penduduk, akan tetapi pada musim kemarau kebutuhan air harus diambil dari daerah Ledok Wonosari. Walaupun kekurangan air, ada beberapa tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah ini seperti jati, akasia, sonokeling, mahoni, kapuk randu, padi gogo, dan mlinjo.

Pada daerah yang kondisi tanah dan ketinggiannya berbeda-beda ini pohon jati dapat tumbuh di berbagai tempat dan membentuk hutan, baik tempat rendah maupun tempat yang tinggi.<sup>11</sup> Hutan jati di Gunung Kidul telah ada sejak lama dan tidak diketahui asal-usulnya. Menurut cerita rakyat, pada zaman Hindu Gunung Kidul masih tertutup hutan lebat dan menjadi tempat pertapaan atau perguruan yang diantaranya menjadi tempat perguruan silat/beladiri dan markas pemberontak. Pada masa Mataram Islam, daerah ini kemudian terkenal sebagai

<sup>10</sup>Van Valkenburg dan J. Th. White, "Enkele Aanteekeningen Omtrent Het Zuidergebergte (G. Kidoel)", *Teysmania*, 1923, hlm. 134.

<sup>11</sup>Berdasarkan sifat botanisnya pohon jati umumnya tumbuh pada ketinggian 1.000-1.800 m dari atas permukaan laut, menyukai tanah batu kapur, berhawa panas, dan kurang hujan. Pada musim kemarau daun-daun jati meluruh untuk mengurangi penguapan dan pada musim hujan daun-daun mulai muncul kembali. Lihat R. Supardi, *Marilah ke Hutan*, Jil. 1 & 2 (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1962), hlm. 37.

tempat persembunyian para pemberontak atau orang-orang yang enggan mengikuti aturan raja.<sup>12</sup>

Sekitar perang Diponegoro (1825-1830) hutan di Gunung Kidul yang didominasi pohon jati masih tampak luas kecuali bagian timur Ledok Wonosari karena daerah ini telah menjadi pemukiman penduduk. Menurut laporan perjalanan Junghuhn (seorang ahli ilmu tumbuhan dan ilmu bumi)<sup>13</sup>, pada tahun 1836 pohon-pohon jati yang tumbuh di batuan kapur banyak terdapat di pegunungan Batur Agung bagian utara, selatan Kebo Kuning sampai ke Awu-Awu. Junghuhn menyebutkan pula bahwa hutan di sekitar desa cenderung berkurang dan di sekitar pemukiman hanya ditumbuhi alang-alang. Kondisi ini disebabkan kebiasaan penduduk membakar tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah untuk mengusir binatang buas/liar dan membuka ladang. Tahun 1840-an, menurut Cordes (Inspektur Jawatan Kehutanan) Gunung Kidul masih ditumbuhi hutan jati yang bagus dan luas, tetapi empat puluh tahun kemudian atau sekitar tahun 1881 hanya tinggal sisa-sisa. Kerusakan hutan jati ini disebabkan pemenuhan kebutuhan kayu dari pihak keraton Kasultanan Yogyakarta.<sup>14</sup> Kebutuhan kayu ini dibebankan pada rakyat dalam bentuk *pundutan nagari* yang merupakan salah satu bentuk pajak. Berdasarkan laporan Danureja IV pajak dalam bentuk ini ternyata sangat memberatkan bagi rakyat terutama rakyat kecil (*tiyang alit*).<sup>15</sup>

Kayu-kayu jati yang dibutuhkan pihak keraton antara lain digunakan untuk keperluan pembangunan Pasanggahan Ambarukmo di Gowok yang dinilai sebagai suatu pemborosan. Pemborosan penggunaan kayu jati ini adalah selain dibutuhkan dalam jumlah besar juga karena keraton masih sangat mempercayai aturan adat dan kepercayaan Jawa dalam pemilihan kayu jati yang baik. Menurut adat dan kepercayaan Jawa, pohon jati apabila dijadikan bahan bangunan rumah akan berpengaruh terhadap kehidupan orang yang tinggal di dalamnya, oleh karena itu harus dipilih yang baik agar terhindar dari bencana. Kayu jati yang baik menurut kepercayaan ini dilihat dari pertumbuhannya dan keadaan ketika proses penebangannya, contohnya kayu jati satu batang atau bercabang tiga (disebut *trajumas*) dipercaya akan mendatangkan rejeki sedangkan kayu jati yang ketika ditebang roboh bersandar pada pohon jati lain (disebut *sundang*) akan

<sup>12</sup>Mengenai pemberontakan yang dimulai dari Gunung Kidul lihat, Sudibjo Z. H. *Babad Tanah Jawa*, terj. (Jakarta: Depdikbud, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1980); Lasman Marduwu et al., *Babad Panambangan*, terj. (Jakarta: Depdikbud, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1981).

<sup>13</sup>Waluyo Nibbering, "Pengendalian Hutan di Gunung Kidul Beberapa Catatan Sejarah", Laporan Penelitian (Fakultas Kehutanan UGM), hlm. 11.

<sup>14</sup>J.W.H. Cordes, *op. cit.*, hlm. 224-225.

<sup>15</sup>Vincent J.H. Houben, *Kraton and Kumpeni Surakarta and Yogyakarta 1830-1870* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 176.

mengakibatkan penghuni rumah turun derajatnya atau mendapat kecelakaan karena tetangganya. Dengan kepercayaan seperti ini maka akan banyak kayu jati yang setelah ditebang tidak terpakai karena salah memilih dan salah menebang.

Kerusakan areal hutan jati di Gunung Kidul diakibatkan pula oleh masalah beban kerja wajib dan pajak. Kedua masalah ini menyebabkan terjadinya migrasi penduduk dari daerah subur ke daerah kering di Gunung Kidul dengan perhitungan bahwa jika hidup di daerah kurang subur atau tidak subur maka kewajiban membayar pajak dan kerja wajib akan berkurang dengan sendirinya. Tahun 1845 penduduk Gunung Kidul diperkirakan sebesar 16.000 jiwa dan tahun 1867 mencapai 28.000 jiwa. Kenaikan ini disebabkan adanya migrasi dari dataran rendah utara dan selatan Gunung Kidul, dan dari daerah Jawa Tengah lainnya. Penurunan jumlah penduduk secara drastis pada tahun 1845-1867 di daerah pusat penanaman nila di Sleman dan Kalasan merupakan akibat penghindaran pajak dan kerja wajib. demikian pula migrasi penduduk Rembang ke daerah *Vorstenlanden* pada tahun-tahun setelah Tanam Paksa juga sebagai salah satu cara yang dilakukan penduduk untuk menghindari tekanan kerja wajib dan krisis pangan.

Perpindahan penduduk ini menimbulkan pembukaan pemukiman baru dan lahan pertanian baru di Gunung Kidul. Di daerah pegunungan Sewu, menurut laporan Veth pada tahun 1890 hutan jati telah menyusut, sebagian telah hilang berganti menjadi lahan ilalang dan rumput. selain itu pegunungan Sewu juga mengalami pertumbuhan penduduk. Demikian pula daerah Ledok Wonosari, menurut laporan Danes pada tahun 1909 telah menjadi desa yang padat penduduknya.<sup>16</sup> Jika semula hanya daerah datar yang digunakan sebagai lahan pertanian, tetapi ketika lahan ini makin sempit maka lereng-lereng juga mulai ditanami sebagai lahan tegalan. Lahan pertanian tegalan ini kemudian digunakan secara terus menerus tanpa diistirahatkan dalam waktu lama sehingga lahan-lahan curam yang mudah mengalami erosi ini lama kelamaan mulai tidak produktif dan menjadi gundul. Gundulnya hutan-hutan tersebut kemudian mempengaruhi pula keseimbangan hidrologis lahan sekitarnya, salah satu akibatnya adalah berkurangnya luas sawah. Sawah-sawah yang dulunya masih diairi kemudian berubah menjadi lahan tegalan.<sup>17</sup>

### **Hutan Jati Gunung Kidul Di Bawah Kesultanan – Gubernemen**

Status administrasi pemerintahan Kesultanan Yogyakarta sejak masa Sultan Hamengkubuwono I mempengaruhi hak dan kewajiban atas pengelolaan dan eksploitasi hutan jati di Gunung Kidul. Sultan Yogyakarta hanya dianggap sebagai raja vasal dari pemerintah Kolonial dan mempunyai wewenang hanya dalam masalah tertentu saja seperti urusan tanah, pengangkatan pegawai (kecuali

<sup>16</sup>Waluyo Nibbering, *op. cit.*, hlm. 20.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

*patih*), pemberian gelar, penggunaan payung kebesaran, penjagaan keraton dan upacara keraton.<sup>18</sup> Sebagai akibat status Kasultanan yang semi-otonom ini kekuasaan Sultan menjadi sempit dan harus mengakui penguasa tertinggi Pemerintah Hindia Belanda.

Sejak tahun 1812 hutan jati di daerah *Vorstenlanden* Yogyakarta menjadi monopoli Pemerintah Hindia Belanda. Monopoli ini merupakan akibat perjanjian yang dibuat oleh pemerintah Raffles dengan penguasa *Vorstenlanden* pada tanggal 1 Agustus 1812 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Inggris berhak atas kayu jati dan bukan atas hutan-hutan jati dan tanahnya, dengan demikian Pemerintah Inggris hanya berkuasa atas hasil hutannya tetapi masalah pengelolaan dan eksploitasinya dilakukan oleh Kesultanan Yogyakarta.<sup>19</sup>

Setelah perjanjian ini selama 30 tahun eksploitasi liar atas hutan jati di seluruh Jawa, termasuk Gunung Kidul, dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan kayu bakar bagi pabrik gula dan arak yang didorong oleh Pemerintah Kolonial, akibatnya hutan-hutan jati menjadi gundul.

Tahun 1847 Residen Yogyakarta R. de Fillietaz Bousquet (1845-1848) melaporkan kepada J.C.W. van Nes seorang anggota Dewan Hindia dan Komisaris Pemerintah *Vorstenlanden* tentang kondisi hutan jati di Gunung Kidul yang buruk akibat kesewenangan pengelolaan oleh pihak Kesultanan. Menanggapi laporan ini, van Nes kemudian menyusun rancangan hutan untuk Gunung Kidul dengan tujuan agar pemerintah, raja, dan penduduk bisa memetik keuntungan sebesar mungkin dari hutan Gunung Kidul, yaitu:

1. Pemerintah Hindia Belanda meminta jaminan atas wewenang proyek kayu yang diperlukan dengan pembayaran upah penebangan dan pengangkutan kepada Sultan; Sultan harus memenuhi kebutuhan kayu Pemerintah Hindia Belanda dan memberikan juga kesempatan kepada pihak swasta untuk mendapatkan kayu;
2. Sebaiknya penduduk tidak dibebani pajak lain kecuali penyeteroran kayu agar penduduk bersemangat untuk penebangan dan penjagaan hutan; memberikan kayu-kayu kecil kepada penduduk, dan industri-industri akan mendapatkan kayu secara lokal;
3. Kayu-kayu dibawa ke Yogyakarta dan patih bertugas sebagai pelaksana administrasi dan pendistribusian kayu-kayu tersebut;
4. Residen bertanggungjawab atas semua pekerjaan tersebut.

<sup>18</sup>G.P. Rouffaer, "Swapraja", *Adatrechtbundels XXXII*, no. 18, terjemahan (The Hague: Martinus Nijhoff, 1931), hlm. 31; Soekanto, *Perjanjian Giyanti: Perang Pahlawan Dipanegara* (Jakarta: N.V. Soeroengan, 1952); Riccklefs, *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1792* (London: Oxford University Press, 1974), hlm. 50-52.

<sup>19</sup>*Gegevens Over Djokjakarta 1926 A*, hlm. 75.



Sebagai kelanjutan dari rancangan van Nes ini, berdasarkan perintah Gubernemen tanggal 13 April 1847 no. 307, Residen membuat garis besar usulan peraturan kehutanan kepada *patih* R. Adipati Danuredjo tanggal 3 Mei 1848 no. 96, yaitu:

1. Gunung Kidul dibagi menjadi tiga bagian yaitu wilayah *Riskulon*, *Ristengah*, dan *Riswetan*, yang mencakup 347 junk dengan 5.473 kuli:
2. Selama 5-6 hari sebanyak 144 orang kuli membawa kapak untuk menebang dan 488 orang kuli bertugas membawa kayu dan ranting ke Piyungan di bawah pengawasan pengawas hutan di Kenet. Pengangkutan dilakukan oleh 9 orang kuli dengan 2 kerbau. Pengangkutan dari Piyungan ke Yogyakarta dilakukan dengan pedati:
3. Pajak dalam bentuk uang dihapus: *Panji*, *Ronggo*, dan Demang harus mengawasi penanaman benih jati: kayu dapat dibeli penduduk untuk peralatan pertanian dan seorang penulis akan mengurus jual-beli:
4. Diusulkan adanya peraturan tentang kerja wajib bahwa dalam 7 hari 1.000 orang kuli dan 8 orang Demang bertugas menebang dan mengangkut kayu di bawah perintah dan pengawasan seorang administrator. Diusulkan supaya seluruh staf pengelola hutan jati ada di bawah seorang administrator dibantu 2 orang mandor:
5. Kenaikan gaji seorang administrator sampai f120,- dianggap perlu dan kenaikan-penurunan gaji disesuaikan dengan keuntungan:
6. Sawah, tegalan, dan tanah hutan dianggap sama dengan tanah-tanah lain milik sultan dan dipungut sewa:
7. Kerja wajib hanya dipungut bagi penebangan dan penarikan kayu jati.

Tahun 1848 peraturan ini segera berlaku, akan tetapi peraturan ini dipandang masih sangat sederhana. C. van den Berg yang ditugaskan sebagai *penerjemah* di Gunung Kidul melaporkan bahwa peraturan yang ditetapkan belum memenuhi harapan, banyak penyelewengan dan pelanggaran dilakukan oleh para kepala dan mandor sehingga yang terjadi adalah perusakan hutan yang lebih parah, penyelundupan kayu secara besar-besaran, dan pemerasan atas penduduk miskin. Dalam penelitian tentang adanya pengurangan penyeteran kayu terbukti bahwa administrator yang diangkat sementara tidak melaporkan kepada *patih* mengenai kelalaian para kepala distrik dan Tumenggung Poncodirejo. Para *panji* yang mengurus penyeteran kayu harus mengirim dua sampai tiga kali dengan menggunakan tenaga penduduk. Kegiatan ini terlalu berat bagi penduduk ditambah adanya penindasan, pemerasan, dan penekanan dari para kepala yang mengakibatkan sebagian penduduk melarikan diri untuk menghindari beban kerja yang sewenang-wenang. Van Berg juga melaporkan tentang kekosongan penduduk di Gunung Kidul dan terbengkalainya hutan jati. Tahun 1849 dibentuklah sebuah

komisi untuk meneliti masalah ini, dan terbukti peraturan yang telah dibuat terlalu berat menindas penduduk. Sebagai tindak lanjut penelitian ini kemudian dilakukan beberapa tindakan untuk memperbaharui peraturan kehutanan 1848 tersebut.

Tahun 1856 van Berg melaporkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk di tempat penimbunan kayu di Kenet serta terlihat ada perhatian dan semangat para pekerja wajib menjalankan kewajibannya menebang dan mengangkut kayu. Akan tetapi, kondisi ini tidak disenangi para kepala terlebih dengan adanya peningkatan kemakmuran penduduk karena itu mereka mengusulkan peraturan kehutanan dicabut. Usul ini berakhir dengan dipecatnya administratur pengawas kehutanan dan digantikan oleh Ngabehi Kromotjono. Penebangan dan pengangkutan kayu ke Piyungan diserahkan kepada pengawas di Kenet, sedangkan pengangkutan dari Piyungan ke Yogyakarta diurus oleh M. Ngabehi Poncopati. Semua kegiatan pengelolaan hutan ada di bawah pengawasan Raden Tumenggung Ronodirdjo, seorang bekas Bupati Purwodadi yang dipecat pada tahun 1826 karena terbukti melakukan pemerasan dan penindasan terhadap penduduk.<sup>20</sup> Pengelolaan selanjutnya menjadi wewenang penuh Sultan Yogyakarta yang menugaskan *patih* sebagai pelaksana.

Perubahan ini justru memperburuk keadaan. Banyak penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orangnya *patih* sementara bupati Gunung Kidul tidak mampu menanggulangi masalah ini. Para *panji* dan *ronggo* mempergunakan tenaga penduduk untuk kepentingannya sendiri, dan untuk mengangkut kayu penduduk diharuskan menyediakan kerbau. Para *bekel* selain bertindak sebagai pengawas juga bertugas menyediakan tenaga, membersihkan bekas-bekas tebangan, melakukan penebangan kesambi, serta menyediakan dan mengangkut kayu arang ke Yogyakarta. Para pekerja wajib dibebaskan dari kewajibannya dengan penebusan uang dan beras.

Setelah sekitar 19 tahun pengelolaan dijalankan oleh *patih*, pada tanggal 11 Oktober 1875 Residen Yogyakarta Wattendorff mengirimkan surat kepada *patih* untuk memperoleh persetujuan Sultan tentang rencana mengatur kembali pengelolaan hutan jati yaitu:

1. Bupati dan wakilnya harus mengawasi pencurian kayu dan pemeliharaan hutan: pada musim hujan sebanyak mungkin jati ditanam dan tanaman yang mati dibuang; penebangan dan penanaman setiap bulan harus dilaporkan;
2. Penebangan kayu harus atas sepengetahuan dan perintah keraton: kayu yang ditebang harus diperiksa dan ditunjuk oleh pengawas: tidak boleh ada penebangan serampangan; penebangan terbatas pada kayu yang jatuh dan mati; kayu yang sudah ditebang secepatnya diangkut ke Getas dan

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 77

Mengguro, selanjutnya disimpan dalam gudang di tempat penimbunan kayu di kediaman *patih* di Danurejan: dari Danurejan kayu diangkut ke gudang Piyungan dan Potrobayan:

3. Para mandor dan kepala gudang harus mencatat kayu yang telah ditebang, diterima, dan dikirim sesuai model yang ditetapkan: tidak ada lagi ijin bagi penebangan kayu untuk pembuatan pedati dan alat pertanian, kayu untuk keperluan tersebut akan ditetapkan negara dengan harga yang pantas:
4. Akan diangkat seorang pengawas dengan gaji f30,- per bulan dibantu 11 orang untuk gudang, 4 orang mandor dengan gaji f10,- per bulan dan masing-masing dibantu 1 orang pembantu, 3 orang pemimpin gudang atau penulis dengan gaji f15,- per bulan yang masing-masing dibantu 7 orang pembantu:
5. Untuk kerja *blandong* dan pengangkutan kayu oleh *patih* akan dibuat peraturannya dengan persetujuan antara pihak Sultan dan Pemerintah Hindia Belanda, untuk sementara aturan lama masih berlaku.

Rencana ini disetujui Sultan melalui suratnya tanggal 7 Nopember 1875 dan perintah yang perlu segera dikeluarkan. Dalam peraturan baru ini telah ditetapkan peraturan penebangan kayu dan sistem pemasarannya, akan tetapi tidak ada pengetahuan teknik pengolahan kayu yang memadai serta tidak ada pula peraturan tentang pengawasan keamanan hutan. Keamanan hutan diserahkan kepada para demang yang sulit dipercaya kesetiaan dan cara kerjanya.

Setelah beberapa tahun peraturan terakhir berjalan, tahun 1882 Menteri Koloni von Golstein menulis surat kepada Pemerintah Hindia Belanda bahwa ia tidak menyukai tindakan Pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan isi perjanjian 1812 membiarkan hutan ditebangi dan menganggap tidak berwenang melakukan penanaman pohon-pohon jati kembali.<sup>21</sup> Keluhan ini ditanggapi pemerintah Hindia Belanda dengan mendesak Direktur Pemerintahan Dalam Negeri untuk mempertimbangkan penanaman kembali wilayah yang baru saja ditebangi. Sultan juga menyetujui hal-hal yang dikemukakan oleh Golstein dalam Keterangan Sultan tanggal 19 Januari 1895.

Tahun 1884 Pemerintah Hindia Belanda meminta Residen Yogyakarta van Baak untuk mengirimkan peraturan kerja *blandong* dan pengangkutan kayu yang berlaku di Yogyakarta. Akan tetapi permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena selama ini tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang kerja wajib dalam kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu. Kerja wajib hanya berdasarkan pada adat yang tidak tertulis.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 75-76.

### Peralihan Ke Dinas Kehutanan Hindia Belanda

Tahun 1892 Penilik Hutan Wilayah Semarang-*Vorstenlanden* menulis surat kepada Residen Yogyakarta bahwa pemerintah pribumi atau pihak kesultanan telah mengeksploitasi hutan secara serampangan, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan:

1. Pengawasan ketat terhadap perusakan hutan, pencurian kayu, dan penebangan hutan yang telah ditentukan;
2. Reboisasi di bawah pengawasan pengawas bidang kehutanan yang dibantu seorang mantri dan 2 orang penjaga hutan;
3. Penebangan hutan seluas 40-50 Ha, pembersihan hutan dan penanaman benih jati, dilakukan dengan kerja bebas dan hasil penebangan kayu dijual di Potrobayan.

Dua tahun kemudian usulan ini segera dilaksanakan. Tahun berikutnya Residen mengusulkan rencana pengelolaan hutan di sekitar Wonolegi di bawah pengawasan Pemerintah Hindia Belanda dengan alasan untuk mencegah kehancuran hutan di daerah ini. Di hutan ini akan ditanam pohon jati muda dengan biaya pengelolaan dan gaji mandor berasal dari hasil penjualan kayu yang ditebang, akan tetapi jika ada kekurangan dana akan ditanggung bersama Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Yogyakarta dan jika ada kelebihan akan dibagi bersama. Dalam suratnya tanggal 19 Januari 1895 Sultan menyetujui rencana tersebut dan juga tentang aturan pengawasan keamanan hutan dan penempatan polisi hutan yang diajukan Residen. Akan tetapi pengawasan keamanan hutan berada langsung di bawah pemerintah pribumi, dan pengelola hutan tidak berwenang apapun atas polisi hutan ini. Polisi hutan yang diangkat Sultan ini adalah para pemegang *apanage* dan lewat *apanagenya* mereka mendapatkan penghasilan atau gaji.

Peraturan kehutanan tahun ini kemudian ditambah dengan Keputusan Pemerintah No. 22 tanggal 18 Juni 1895 yang menetapkan:<sup>22</sup>

1. Direktur Pemerintah Dalam Negeri diberi dana f 4.300,- untuk biaya penebangan dan pengumpulan kayu dari 50 Ha luas hutan jati Gunung Kidul, dan Kepala Departemen Dalam Negeri diberi wewenang untuk menjual kayu yang diperoleh demi kepentingan negara;
2. Perlu diajukan usul tentang perhitungan untung dan rugi dengan Sultan Yogyakarta sesuai dengan surat tanggal 19 Januari 1895.

Pada Juli 1895, urusan hutan Gunung Kidul mulai ditangani Pengawas Hutan Kedu yang berada di Magelang. Mulai saat ini eksploitasi hutan Gunung Kidul dijalankan secara teratur oleh pegawai-pegawai teknis dan setiap tahun

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

sejumlah izin akan diberikan dengan Keputusan Pemerintah untuk pekerjaan lanjutan pengelolaan hutan. Satu tahun berikutnya Pengawas Hutan Kedu melaporkan bahwa eksploitasi hutan Wonolegi telah dilakukan serampangan oleh penduduk sekitar Wonolegi untuk pembakaran kayu arang dan pihak Keraton Yogyakarta untuk pembangunan pasanggrahan Ambarukmo. Karena kondisi ini Pengawas Hutan Kedu mengusulkan supaya mencabut izin pembakaran kayu arang, kemudian menempatkan *demang pengalasan* di bawah pengawasan Pengawas Hutan dan memperbaiki jalan dari Wonolegi ke Piyungan yang dimulai pada musim hujan.

Peraturan-peraturan yang telah dibuat ternyata masih banyak kekurangannya. Tahun 1902 Penilik Hutan mengajukan usulan kepada Residen Yogyakarta untuk mencegah eksploitasi tidak teratur yang dilakukan pemerintah pribumi atau Kesultanan Yogyakarta. Dinas Kehutanan supaya memperluas wilayah eksploitasi dengan memberi tanda atau batas, mengukur, dan memetakan lahan hutan dengan baik dan menanami lahan terbuka yang ada untuk mencegah pelepasan hutan jati. Diusulkan pula untuk menjadikan cadangan hutan jati tua yang ada di dekat Pemakaman Karangasem bagi Sultan, jenis-jenis kayu liar yang tumbuh di hutan jati tersebut diserahkan kepada Sultan, dan dipertimbangkan pemberian tambahan kayu untuk Kraton dalam jumlah tertentu secara cuma-cuma. Selain itu diusulkan pula untuk membebaskan penduduk Gunung Kidul dari semua *peraneman* dan memungut pajak atas penduduk pekerja wajib pajak sebesar f5.75,- per *kuli kenceng* dan f1.75 per *kuli indung* per tahunnya.

Pada tahun yang sama pula Residen Couperus (1902-1908) atas nama Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 15 Desember 1902 mengirim surat kepada Sultan tentang pandangan Pemerintah Hindia Belanda terhadap wewenang yang telah diberikan kepada Sultan mengenai eksploitasi hutan jati Gunung Kidul yang ternyata semakin bermasalah. Karena itu Pemerintah meminta Sultan menyerahkan pengelolaan dan eksploitasi hutan tersebut kepada Pemerintah Hindia Belanda. Permintaan ini kemudian disetujui Sultan melalui surat tanggal 3 Mei 1904 no. 1785, yang menyatakan bahwa Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Yogyakarta akan membuat peraturan bersama. Tanggal 27 Juni 1904 dicapai kesepakatan tentang pengalihan pengelolaan hutan Gunung Kidul dari Sultan ke tangan Pemerintah Hindia Belanda<sup>23</sup>. Mulai 1 Juni 1904, pengelolaan hutan tersebut segera ditangani oleh Dinas Kehutanan Hindia Belanda.

Peralihan ini merupakan babak baru pengelolaan dan eksploitasi hutan Gunung Kidul. Dinas Kehutanan Pemerintah Hindia Belanda segera melakukan pemetaan dan pengukuran lahan hutan jati. Hasil pengukuran ini akan disahkan

---

<sup>23</sup> *Memorie van Overgave Residen Yogyakarta tahun 1902-1908*, nota tentang kehutanan di keresidenan Yogyakarta.

oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan perubahan lahan jati yang telah ditetapkan tidak akan dilakukan tanpa izin Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Masalah keamanan akan ditangani oleh polisi hutan, yang merupakan wewenang bersama Sultan dan pemerintah Hindia Belanda. Rumah, gudang, dan bangunan yang masih ada di Mengguro, Getas, Potrobayan, dan Kedungwanglo dipinjamkan oleh Sultan kepada Dinas Kehutanan untuk keperluan administrasi dan pengelolaan hutan. Sejak 1 Juli 1904, sejumlah kerja wajib yang dilakukan wajib kerja pria untuk kepentingan aktivitas di hutan diganti dengan pembayaran pajak kepada para pemegang *apanage* yang akan digunakan untuk membayar upah tetap bagi para pekerja keamanan hutan dan pekerjaan pembukaan, perawatan, dan perbaikan jalan-jalan besar, jembatan, selokan, dan bangunan-bangunan negara.

Berdasarkan kontrak 1904, sebagai ganti rugi bagi Sultan karena pengalihan hak pengelolaan hutan jati tersebut adalah pemberian kayu jati secara cuma-cuma untuk keperluan "keraton", yaitu Pasanggrahan Ambarukmo dan Ambarwinangun. Setelah "keraton" ini selesai pada tahun 1919, kepada Sultan akan dibayarkan sebesar f8000,- sebagai ganti penyerahan kayu tersebut. Apabila Sultan membutuhkan kayu jati dari Gunung Kidul maka dikenakan tarif dan peraturan yang sama sebagaimana penyeteroran kayu dari hutan negara bagi proyek pekerjaan umum. Satu-satunya hutan yang bisa dikelola dan dieksploitasi oleh Sultan adalah hutan yang terletak di Pemakaman Karangasem yang terletak di komplek hutan jati Paliyan I Gunung Kidul. Pelaksanaan penebangan kayu di hutan milik Sultan ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Hindia Belanda mulai dari penebangan, pengumpulan, pengukuran, dan penggergajian, kemudian pengambilan dan pengangkutannya dilakukan oleh pegawai Kesultanan. Biaya seluruh eksploitasi ini ditanggung bersama pihak Kesultanan dan Dinas Kehutanan. Mengenai keuntungan hasil eksploitasi hutan Gunung Kidul, setiap tahun Sultan akan menerima separuh saldo keuntungan dan juga ikut menanggung saldo kerugiannya.<sup>24</sup>

Masalah keamanan yang ditangani bersama antara Sultan dan Pemerintah Hindia Belanda menurut Penilik Hutan telah terjadi ketidakcocokan antara polisi hutan dan pegawai kehutanan Eropa, dan mencatat beberapa kelemahan yang dilakukan oleh Demang. Demang tidak menangkap pencuri kayu atas perintah keraton dan dalam pelaksanaan keamanan hutan. Demang sering melibatkan para pencuri kayu, selain itu Demang tidak dapat diperintah untuk mencari kayu yang hilang karena banjir. Mengenai kebakaran hutan Demang tidak mau berusaha mencegah kebakaran hutan. Setiap tahun memang ada perintah pembakaran hutan akan tetapi Demang tidak banyak memahami soal kebakaran hutan.

Kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Demang ini disebabkan peralihan penanganan hutan jati ke tangan Pemerintah Hindia Belanda, yang

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

menghilangkan kesempatan Demang untuk mendapatkan keuntungan karena seluruh pengelolaan hutan jati dimonopoli secara ketat oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Hindia Belanda. Di samping itu Demang tidak merasa memiliki hutan jati tersebut sehingga tidak memperdulikan keberadaan dan keamanannya, sementara itu polisi hutan sangat tergantung pada para penguasa pribumi. Kondisi ini dipandang telah cukup parah, sehingga kemudian pada tanggal 15 Desember 1908 Penilik Hutan menyampaikan surat yang berisi beberapa tindakan yang perlu dilakukan untuk menanggulangnya yaitu:<sup>25</sup>

1. Merubah kedudukan polisi hutan di bawah pihak pengelola hutan sebagaimana yang selama ini sudah berlaku di daerah-daerah milik pemerintah Hindia Belanda;
2. Gaji dapat diambil dari penghasilan *apanage* dan perhitungan bersama antara Sultan dan Pemerintah Hindia Belanda;
3. Pengangkatan dan pemecatan pegawai tetap dilakukan oleh Sultan atas nasehat Residen Yogyakarta;
4. Sembilan orang *demang pengalasan* diganti dengan tiga mantri dan enam penjaga hutan.

Usulan ini kemudian disetujui Sultan melalui surat Patih tanggal 12 Juni 1909 no. 247/I<sup>26</sup> tentang kesepakatan reorganisasi polisi hutan Gunung Kidul. Menurut kesepakatan itu 9 orang *demang pengalasan* yang telah diangkat dan dipekerjakan Sultan tetap dipekerjakan sebagai polisi hutan yaitu 3 orang diangkat menjadi mantri polisi dengan gaji f47.- dan 6 orang lainnya diangkat penjaga hutan dengan gaji f20.- per bulan. Para polisi hutan ini tetap menjadi *sentana* Sultan karena hak pengangkatan dan pemecatan mereka tetap berada di tangan Sultan dengan kesepakatan Residen. Para polisi hutan ini tetap taat pada bupati Gunung Kidul, akan tetapi bupati tidak boleh mencampuri urusan polisi hutan karena mereka berada langsung di bawah pejabat kehutanan yang ditunjuk oleh Residen. Urusan gaji akan dilakukan menurut perhitungan bersama antara Sultan dan Pemerintah Hindia Belanda, dan kemudian *apanage* akan dihapus. Setelah reorganisasi 1909 ini perluasan personil keamanan perlahan-lahan terjadi.

### Hutan Jati Di Bawah Dinas Kehutanan Hindia Belanda

Sejak 1904, di bawah Dinas Kehutanan Hindia Belanda, beberapa teknis pengelolaan hutan jati Gunung Kidul seperti pengangkutan kayu, pengukuran dan pemetaan lahan, serta pemasaran kayu diperbaiki melalui Rancangan

<sup>25</sup> Gegevens Over Djokjakarta, 1926, *op.cit.*, hlm. 83.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Perusahaan<sup>27</sup>. Pada tahun 1920 sampai 1929 berlaku Rancangan Perusahaan Sementara, dan diperpanjang untuk jangka tahun 1930 sampai 1932. Rancangan Perusahaan Tetap baru dimulai tahun 1933 sampai 1942. Tujuan utama Rancangan Perusahaan di kawasan hutan jati Gunung Kidul adalah menggalakkan produksi kayu jati dengan memanfaatkan lahan kosong dan melakukan penebangan. Bagi kepentingan masyarakat, tujuannya adalah penggunaan lahan sesingkat-singkatnya dengan biaya sekecil-kecilnya, melangsungkan produksi secara terus menerus dan menghasilkan produk bernilai tinggi bagi kepentingan masyarakat.<sup>28</sup>

Di kawasan hutan jati Gunung Kidul masalah pengangkutan merupakan masalah utama. Sampai tahun 1926 pengangkutan kayu menggunakan aliran sungai terutama sungai Oya yang mengalir dari utara ke barat secara langsung melalui kawasan hutan jati. Selain sungai Oya, sungai Prambutan juga menjadi bagian penting pengangkutan kayu jati. Sistem yang digunakan adalah penghanyutan kayu melalui arus sungai, yang kemudian ditangkap atau dijaring dengan kabel yang mengapung di mulut sungai. Dari sini kayu-kayu kemudian dibawa ke tempat penampungan kayu Potrobayan yang terletak di tepi sungai Opak. Sistem ini ternyata sangat berbahaya pada musim hujan dan jika terjadi banjir mendadak. Selama ini gejala datangnya hujan yang dapat diketahui dari Magelang segera diberitahukan melalui telepon ke Playen sehingga kayu-kayu dapat diselamatkan, akan tetapi cara ini tidak selalu berhasil. Sistem pengangkutan itu hanya dapat digunakan secara maksimal pada musim kering. Selain itu, sistem tersebut dianggap tidak efisien dalam hal biaya karena besarnya biaya pemeliharaan yang digunakan untuk merawat tempat penampungan kayu Potrobayan dengan peralatan penangkap kayunya.<sup>29</sup>

Tahun 1927 sistem pengangkutan kayu melalui sungai diperbaiki dengan membangun bangunan penangkap kayu dan jalan penghubung ke Imogiri di kawasan Pengkol. Tahun 1930 bangunan penangkap kayu tersebut selesai,<sup>30</sup> akan

---

<sup>27</sup>Penataan hutan yang sistematis dan seragam di Jawa baru dilakukan setelah ada Bagian Penataan Hutan yang ditetapkan dalam Peraturan Hutan tahun 1897. Penataan hutan ini bertujuan menertibkan dan memantapkan pengelolaan dengan sebanyak mungkin memperhatikan rakyat setempat agar memperoleh keuntungan maksimal secara berkesinambungan baik langsung maupun tidak langsung, dan untuk itu perlu dibuat Rancangan Perusahaan. Selain Rancangan Perusahaan dibentuk pula Kesatuan Pemangkuan Hutan yang disebut distrik hutan yang luas dan batasnya ditetapkan oleh Gubernur Jenderal, dan setiap distrik hutan dikelola oleh *Pejabat Boschevezen*. Bagian-bagian distrik hutan yang sudah ditata tetap jika sudah tiba saatnya oleh Gubernur Jenderal dapat dipisah dan digabung menjadi Kesatuan Pemangkuan Hutan tersendiri yang disebut *Houtvesterij* dengan luas antara 2.500 – 10.000 Ha.

<sup>28</sup>*Bedrijfsplan in engerenzin van de houtvesterij Goenoeng Kidoel voor de periode 1 Januari 1933 t m 31 December 1942*, hlm. 124.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 78.

<sup>30</sup>*Ibid.*



tetapi ternyata bangunan itu tidak dapat digunakan karena terjadi penimbunan kotoran pada jaring penangkap dan terjadi banjir sangat besar yang kemudian memutuskan kabel-kabel. Dengan pengalaman ini, akhirnya diputuskan untuk melakukan pengangkutan kayu melalui jalan darat yang dinilai tidak menghabiskan banyak biaya, tidak tergantung pada permukaan air, dan lebih kecil resiko hilangnya kayu.

Jalan darat menuju Gunung Kidul terdapat 2 rute, pertama rute Wonosari - Yogyakarta yang sudah diperkeras (sekitar 40 Km) yaitu Wonosari - Gading - Patuk - Piyungan - Prambanan - Yogyakarta.; kedua, rute Wonosari - Solo/Klaten yang belum diperkeras (sekitar 90 Km) yaitu Wonosari - Karangmojo - Semin - Solo atau Klaten. Di jalan antara Wonosari - Semin terdapat lahan pribadi Sultan, sehingga beberapa jembatan, jalan, dan pintu air yang sangat dibutuhkan dibangun oleh Sultan, dan beberapa dari bangunan tersebut ada yang menjadi milik Sunan Surakarta. Bangunan-bangunan tersebut dihubungkan oleh jalan-jalan desa biasa yang belum diperkeras, oleh karena itu jalur ini tidak diutamakan untuk pengangkutan kayu ke Surakarta. Jalan-jalan lainnya meskipun sebagian telah diperkeras tidak seluruhnya cocok untuk angkutan berat karena banyak jalan berlubang dan hanya dapat digunakan pada musim kering.

Mengenai pemetaan hutan jati, berdasarkan kontrak 1904 disebutkan bahwa lahan hutan akan digaris, ditetapkan, diukur, dipetakan, dan disahkan oleh Pemerintah, dan perubahan lahan hutan yang telah ditetapkan tidak akan dilakukan kecuali dengan izin Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Akan tetapi tidak diketahui secara pasti kelanjutan usaha ini, diperkirakan usaha pengukuran dan pemetaan hutan jati Gunung Kidul baru dilaksanakan pada tahun 1920.

Tahun 1930 dengan Besluit Residen Yogyakarta tanggal 30 November 1932 nomor 3310/53/8<sup>31</sup> dibentuk suatu komisi yang bertugas membuat batas-batas kompleks hutan jati Gunung Kidul yang beranggotakan:

1. Ir. W.J.H. Schophuys, Kepala Wilayah Penguasa Hutan, Kepala Kantor Seksi Bagian Hutan Madiun
2. Mr. E.J. van der Laan, Kontrolir Hutan Madiun
3. KRT. Pringgodiningrat, Bupati Gunung Kidul
4. Ngabehi Hardjopadmopoespito, Wedana Distrik Playen
5. Ngabehi Hardjosoedjadi, Wedana Distrik Semanu
6. Ngabehi Hardjoharsodjo, Wedana Distrik Wonosari

Tanggal 17 Februari 1933 Komisi ini menetapkan bahwa kawasan pengelolaan hutan jati Gunung Kidul terletak di Distrik Playen, Wonosari, dan Semanu. Pemberian batas-batas di peta sesuai dengan rancangan peraturan

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 115.

pembatasan di lapangan. Komisi ini juga membahas masalah pertukaran tanah dengan penduduk. Beberapa kelurahan di distrik Playen, Wonosari, dan Semanu yang sampai laporan itu dibuat belum mencapai persetujuan pertukaran tanah dengan penduduk. Masalah ini berkaitan erat dengan pemancangan batas-batas hutan jati karena adanya pohon jati yang tumbuh di pekarangan rumah penduduk. Sebenarnya pada tahun 1918 ada ketentuan dari Residen Yogyakarta bahwa semua pohon jati yang tumbuh di pekarangan dan tanah usaha adalah milik Dinas Kehutanan, sehingga wilayah ini terukur dan terpetakan sebagai kawasan pengelolaan hutan jati. Akan tetapi ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan dari Dinas kehutanan yang mengatakan bahwa pohon jati yang tumbuh di tanah yang dianggap sudah bukan daerah hutan jati lagi adalah milik penduduk sehingga tidak perlu diukur dan dipetakan.<sup>32</sup>

Meskipun permasalahan tersebut masih belum selesai, pada tanggal 15 Juli 1933 sebuah komisi yang terdiri dari Ir. W.J.H. Schophuys dan Raden Koestijo seorang mandor seksi di Sonde telah menetapkan wilayah-wilayah hutan jati di distrik Playen, Wonosari, dan Semanu yang terbagi menjadi wilayah hutan jati Wonolegi, Kemuning, Wero, Mengguro I, Mengguro II, Paliyan I, Paliyan II, Ngipar, Grogol, Ngringin I, Ngringin II, Wediwutah, Mulo I, Mulo II, dan Blimbing, sebagai daerah penguasaan dan pengelolaan hutan di Gunung Kidul. Pemberian batas tersebut selain menggunakan tanda batas alami seperti sungai, juga digunakan patok-patok bercat putih yang bernomor, sehingga tercipta peta wilayah hutan jati Gunung Kidul dengan skala 1:10.000 sebagai peta kerja, peta berskala 1:25.000 sebagai peta penyelidikan, dan peta berskala 1:100.000 sebagai peta pemandangan, dengan wilayah terukur seluas 13.222 Ha.

Masalah penjualan kayu sejak peralihan pengelolaan 1904 juga menjadi wewenang penuh Dinas Kehutanan. Sistem penjualan yang digunakan adalah pengelolaan pemasaran secara swakelola oleh Dinas Kehutanan tanpa melibatkan swasta, hal ini dimungkinkan karena hutan jati Gunung Kidul tidak seluas hutan jati di wilayah lainnya. Daerah pemasaran utama adalah keresidenan Yogyakarta, yaitu di tempat pelelangan atau penjualan di kota Yogyakarta, Tempel, Wates, dan Wonosari. Penjualan atau pelelangan biasanya dilakukan pada bulan Juli sampai awal Agustus. Sejak 1929 pelelangan dilakukan setiap bulan di Yogyakarta, kemudian pada tahun 1930 pasar lelang yang lebih kecil dan juga beroperasi setiap bulan muncul di Tempel dan Wates. Selain penjualan secara terbuka, terdapat pula kasus penjualan kayu jati di bawah tangan, yang terjadi beberapa kali di daerah hutan jati Panggang dan Katisobo, Gunung Kidul

---

<sup>32</sup> *Arsip Nasional Republik Indonesia, Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*, (Jakarta: ARNAS RI, 1978), hlm. CCLXXIX-CCLXXX.

Tenggara. Penjualan seperti ini bukan untuk tujuan dagang tetapi lebih untuk keperluan sendiri.

Pelelangan di Yogyakarta selalu mendapat banyak perhatian konsumen karena kayu yang ditawarkan berkualitas baik walaupun dalam jumlah yang terbatas. Konsumen kayu terdiri dari pedagang kayu pribumi, Cina, dan Eropa. Pedagang Cina dan pribumi biasanya diberi kesempatan pertama dalam pelelangan ini.<sup>33</sup> Konsumen pribumi adalah pedagang kayu kecil dan menengah, sedangkan konsumen Eropa biasanya pengusaha onderneming atau konsumen pribadi. Sejak pengelolaan ada di bawah Dinas Kehutanan, penduduk mulai dilibatkan dalam penanaman pohon jati dengan cara tumpangsari. Kerjasama dengan penduduk ini merupakan cara terbaik untuk menanggulangi masalah tenaga kerja dan biaya karena setelah penebangan jati dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk membersihkan lahan dan menanam kembali pohon jati secara teratur. Dalam kondisi ini petani setempat yang mau bekerjasama diikatkan dalam kontrak dengan Dinas Kehutanan. Berdasarkan kontrak tersebut, petani yang disebut petani *pesanggem*<sup>34</sup> berkewajiban membersihkan lahan bekas tebangan jati, menanam benih jati dengan teratur sesuai perintah mandor tanam, dan bersedia menanam palawija di antara barisan tanaman jati selama 1-2 tahun. Panen palawija adalah hak petani, selain itu mereka juga mendapat upah pemeliharaan jati berdasarkan luasnya lahan jati per hektar yang mereka kerjakan yaitu antara f14.- sampai f43.- per hektar.<sup>35</sup>

Masalah kebakaran hutan baru mendapat perhatian pada tahun 1915, dan perlindungan hutan dari kebakaran dipercayakan seluruhnya kepada polisi hutan. Dalam perkembangannya, jaminan keamanan hutan dari bahaya kebakaran kemudian dialihkan kepada aparat desa yang wilayahnya berbatasan dengan hutan jati setempat. Desa-desa di pinggir hutan jati dapat melaksanakan perawatan hutan jati dengan baik melalui penjaga setempat dan patroli berkeliling. Tidak ada peraturan yang mengatur tentang pengendalian kebakaran hutan dan sepertinya peraturan ini memang tidak diperlukan, karena selama ini pencegahan kebakaran hutan yang dilakukan penduduk berjalan lancar dan berhasil dengan baik walaupun tanpa imbalan.

## Penutup

Gunung Kidul yang sekarang dikenal sebagai daerah tandus dahulu merupakan lahan hutan jati yang penting, setidaknya bagi Kesultanan Yogyakarta. Sejak 1812 sampai menjelang akhir abad XIX pengelolaan dan eksploitasi hutan jati di Gunung Kidul menjadi tanggung jawab Kesultanan Yogyakarta, sedangkan pihak

<sup>33</sup>Bedrißplan, *op. cit.*, hlm. 19.

<sup>34</sup>Sejarah Kehutanan Indonesia, *op. cit.*, hlm. 165.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

Gubernemen hanya memiliki hak menggunakan kayu-kayu jati dari daerah tersebut dan mengusulkan berbagai teknik pengelolaan kepada keraton. Pada masa itu orang-orang yang bekerja di bawah kuasa Sultan banyak melakukan penyelewengan yang tak dapat ditanggulangi oleh pihak Kesultanan. Di samping itu mereka juga belum memiliki pengetahuan pengelolaan dan pengolahan hutan jati yang baik. Dalam masa pengelolaan di bawah Sultan ini kondisi hutan jati Gunung Kidul mulai memburuk yang disebabkan adanya penebangan pohon-pohon jati secara liar untuk pemenuhan kebutuhan kayu bakar bagi pabrik gula dan arak yang didorong oleh Pemerintah Hindia Belanda, kemudian, pemukiman penduduk mulai berkembang di daerah Gunung Kidul, termasuk di wilayah tumbuhnya pohon-pohon jati, mulai dari lahan-lahan subur hingga lahan-lahan kering. Masuknya penduduk sampai ke lahan-lahan kering ini adalah sebagai salah satu akibat beratnya beban pajak dan kerja wajib yang ditanggung penduduk di daerah asalnya. Selain itu, pihak Keraton sendiri ternyata punya andil terhadap rusaknya hutan jati ini karena pemakaian pohon-pohon jati secara besar-besaran untuk pembangunan "Keraton" Ambarukmo. Kerusakan hutan ini mengakibatkan gundulnya hutan, menyempitnya areal sawah dan sawah-sawah berubah menjadi tegalan.

Akhir abad XIX lahan hutan jati Gunung Kidul semakin mengkhawatirkan, karena itu pengawasan pengelolaan segera diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada awal abad XX, seluruh hutan di Gunung Kidul dikelola sepenuhnya oleh Dinas Kehutanan Hindia Belanda, karena pihak Keraton dinilai tidak mungkin lagi dapat mengelola hutan Gunung Kidul seperti yang diharapkan Pemerintah Hindia Belanda. Di bawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Kehutanan Hindia Belanda dimulailah beberapa teknik pengelolaan yang lebih baik dan modern yang kemudian melahirkan pula Rancangan Perusahaan untuk hutan jati Gunung Kidul.

Dari segi ekonomis beralihnya pengelolaan hutan ke tangan pemerintah Hindia Belanda membuat pemasukan keraton dari bidang kehutanan menjadi berkurang, akan tetapi jika dihitung secara jangka panjang Sultan diuntungkan karena lahan hutan jati terhindar dari kemusnahannya. Pengelolaan hutan jati secara ilmiah yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Hindia Belanda dapat menyelamatkan keberadaan dan kelestarian hutan jati Gunung Kidul. Bagi penduduk, eksploitasi yang teratur memberikan pula pekerjaan bagi mereka di lahan hutan dengan upah dan memberikan keuntungan sendiri dengan diberikannya hak menanam palawija dengan sistem kontrak di lahan hutan jati tersebut.

# Daftar Pustaka

Arsip Nasional Republik Indonesia, *Memori Serah Jabatan 1921-1930*. Jawa Timur dan Tanah Kerajaan. Jakarta: ARNAS RI, 1978.

*Bedrijfsplan in Engeren Zin van de houtvesterij Goenoeng Kidoel* voor de periode 1 januari 1933 t/m 31 December 1942.

Cordes, J.W.H., *Hutan Jati di Jawa*, terj. Malang: Yayasan Manggala Sylvia Lestari, Biro Jasa Konsultan Perencanaan Hutan, 1992.

Dik, "Wong-Kalang Iku Sapa?", *Mekar Sari*, 26 Nopember 1990.

*Encyclopaedia van Nederlandsch-Indie*. Jilid II. 's-Gravenhage-Leiden: M. Nijhoff- E.J. Brill, 1919.

*Gegevens Over Djokjakarta 1926 A..*

Hamid Nuri, "Wong Kalang: Konglomerat Jaman Biyen", *Mekar Sari*, 4 Maret 1992.

Hasanu Simon, *Hutan Jati dan Kemakmuran*. Yogyakarta: Aditya Media, 1993.

Houben. Vincent J.H., *Kraton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarta 1830-1870*. Leiden: KITLV Press. 1994.

Lasman Marduwi et al., *Babad Panambangan*, terj. Jakarta: Depdikbud, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. 1981.

*Memorie van Overgave Residen Yogyakarta tahun 1902-1908*.

Ricklefs, *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1792*. London: Oxford University Press, 1974.

Rouffaer, G.P., "Swapraja". *Adatrechtbundels XXXIV*, no. 18, terjemahan. The Hague: Martinus Nijhoff, 1931.

R. Supardi, *Marilah ke Hutan*. Jil. 1 & 2. Djakarta: Dinas Penerbitan BP, 1962.

- Sejarah Kehutanan Indonesia I: Periode Pra-sejarah tahun 1942*. Jakarta: Departemen Kehutanan, 1986.
- Soekanto. *Perjanjian Giyanti: Perang Pahlawan Dipanegara*. Djakarta: N.V. Soeroengan, 1952.
- Sudibjo Z. H., *Babad Tanah Jawa*, terj. Jakarta: Depdikbud, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1980.
- Van Valkenburg dan White, J. Th., "Enkele Aanteekeningen Omtrent Het Zuidergebergte (G. Kidoel)". *Teysmania*, 1923.
- Waluyo Nibbering, "Pengendalian Hutan di Gunung Kidul Beberapa Catatan Sejarah", Laporan Penelitian. Fakultas Kehutanan UGM.
- Warto, "Kerja Blandongan: Eksploitasi Hutan di Karesidenan Rembang Abad XIX", *Majalah Sejarah*, no. 5, Juli 1994.